



Pelatihan Revitalisasi Koperasi Desa Berbasis Transparansi Partisipatif di Jawa Tengah

Arif Nugroho¹, Siti Aisyah², Dedi Kurniawan³, Rina Puspitasari⁴, Ahmad Fauzi⁵, Lilis Handayani⁶, Rudi Prasetyo⁷

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia – arifnugroho@gmail.com

² Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia – sitiaisyah@gmail.com

³ Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia – dedikurniawan@gmail.com

⁴ Universitas Stikubank, Indonesia – rinapuspitasari@gmail.com

⁵ Universitas Muria Kudus, Indonesia – ahmadfauzi@gmail.com

⁶ Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia – lilishandayani@gmail.com

⁷ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia – rudiprasetyo@gmail.com

Article history:

Received: 06/03/2026

Revised: 25/03/2026

Approved: 09/04/2026

Published: 15/04/2026

Volume 2 Issue: 1, April 2026

Kata Kunci :

Koperasi Desa, Transparansi Partisipatif, Revitalisasi, Tata Kelola, Akuntabilitas

Keywords:

Village Cooperative, Participatory Transparency, Revitalization, Governance, Accountability.

ABSTRAK

Koperasi desa menghadapi tantangan serius terkait lemahnya tata kelola, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan, dan minimnya partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan. Program pengabdian ini bertujuan mengembangkan model pelatihan revitalisasi koperasi desa yang berbasis transparansi partisipatif di wilayah pedesaan Jawa Tengah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui workshop tata kelola, simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), pelatihan pelaporan keuangan, dan pendampingan lapangan selama enam bulan melibatkan 120 pengurus koperasi, 45 pengawas, dan 200 anggota aktif. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman tata kelola koperasi sebesar 79%, peningkatan transparansi laporan keuangan 71%, dan peningkatan partisipasi anggota dalam RAT sebesar 68%. Evaluasi post-program menunjukkan 83% koperasi mitra telah menerapkan sistem pelaporan terbuka dan 75% membentuk tim pengawas internal yang aktif. Program ini berhasil menciptakan ekosistem koperasi desa yang akuntabel, transparan, dan mandiri secara berkelanjutan.

ABSTRAK

Village cooperatives face serious challenges related to weak governance, low transparency in financial management, and minimal active participation of members in decision-making. This community service program aims to develop a participatory transparency-based revitalization training model for village cooperatives in rural areas of Central Java. The implementation method uses a participatory approach through governance workshops, Annual Member Meeting (RAT) simulations, financial reporting training, and six months of field mentoring involving 120 cooperative administrators, 45 supervisors, and 200 active members. Results showed a 79% increase in cooperative governance understanding, 71% improvement in financial report transparency, and 68% increase in member participation in RAT. Post-program evaluation indicated that 83% of partner cooperatives had implemented open reporting systems and 75% formed active internal supervisory teams. This program successfully created an accountable, transparent, and sustainably independent village cooperative ecosystem.

PENGANTAR

Koperasi desa merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, namun kondisinya di banyak daerah masih jauh dari harapan. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mencatat bahwa dari sekitar 130.000 koperasi aktif di Indonesia, hampir 40% mengalami permasalahan tata kelola yang serius, meliputi lemahnya transparansi laporan keuangan, rendahnya partisipasi anggota, dan minimnya kompetensi pengurus dalam mengelola organisasi secara profesional. Di wilayah pedesaan Jawa Tengah, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pendampingan teknis dan rendahnya literasi keuangan pengurus koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Transparansi merupakan fondasi utama pengelolaan koperasi yang sehat dan demokratis. Penelitian Prasetyo dan Nuraeni (2023) mengungkapkan bahwa koperasi yang menerapkan sistem pelaporan keuangan terbuka dan akuntabel memiliki tingkat kepercayaan anggota 65% lebih tinggi dibandingkan koperasi yang tidak transparan. Sayangnya, mayoritas koperasi desa di Indonesia belum memiliki sistem pelaporan yang terstandarisasi dan mudah dipahami oleh seluruh anggota. Kesenjangan antara pengurus dan anggota dalam hal akses informasi keuangan menjadi hambatan utama partisipasi aktif dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum demokrasi tertinggi koperasi (Hidayat & Rokhman, 2024).

Pendekatan partisipatif dalam revitalisasi koperasi terbukti lebih efektif dibandingkan program pelatihan konvensional karena menempatkan anggota dan pengurus sebagai subjek aktif yang terlibat dalam setiap tahapan perubahan. Konsep participatory governance menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem tata kelola yang baru. Model ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis tetapi juga membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) yang kuat terhadap koperasi. Studi Susanto dan Wulandari (2024) menunjukkan bahwa program revitalisasi koperasi berbasis partisipasi menciptakan perubahan tata kelola yang bertahan lama dengan tingkat kepatuhan SOP mencapai 80% setelah dua tahun implementasi (Sutrisno et al., 2023).

Wilayah pedesaan Jawa Tengah yang menjadi lokasi program ini memiliki karakteristik koperasi yang beragam namun menghadapi tantangan serupa. Data Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah 2023 mencatat bahwa 55% koperasi di daerah pedesaan belum melaksanakan RAT secara rutin, 62% tidak memiliki laporan keuangan yang teraudit, dan hanya 18% yang memiliki tim pengawas internal yang aktif. Ketergantungan koperasi pada figur pengurus tertentu tanpa sistem yang terstruktur menciptakan risiko keberlanjutan yang tinggi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan anggota tentang hak-hak mereka dalam koperasi dan mekanisme pengawasan yang seharusnya dapat mereka lakukan (Rahmadani & Firdaus, 2023; Nugroho et al., 2024).

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga komponen utama: peningkatan



kompetensi tata kelola pengurus, penguatan sistem transparansi keuangan, dan pemberdayaan anggota sebagai pengawas aktif. Kolaborasi antara perguruan tinggi, Dinas Koperasi, dan lembaga keuangan desa diharapkan menciptakan model revitalisasi yang sustainable dan replicable di berbagai wilayah. Keunikan program ini terletak pada penekanan co-design dimana pengurus dan anggota koperasi terlibat langsung dalam merancang sistem tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal mereka (Mulyadi & Setiawan, 2024; Anggraeni et al., 2023).

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka pemberdayaan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan utama dalam setiap tahapannya. Pendekatan ini dipilih berdasarkan praktik berbasis bukti yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif pengurus dan anggota koperasi meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program revitalisasi tata kelola. Metode pelaksanaan terdiri dari empat fase utama: perencanaan dan asesmen kolaboratif, pelaksanaan pelatihan multi-level, pendampingan lapangan intensif, dan evaluasi menyeluruh. Setiap fase dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masing-masing koperasi mitra. Tim pelaksana terdiri dari dosen manajemen koperasi, akuntan publik, konsultan tata kelola, dan community organizer yang bekerja secara sinergis.

Desain program mengadopsi teori tata kelola partisipatif (Participatory Governance Theory) yang memandang revitalisasi koperasi sebagai hasil dari interaksi dinamis antara pengurus, anggota, pengawas, dan lingkungan regulasi yang melingkupinya. Teori ini menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mekanisme demokratis yang memungkinkan seluruh anggota berpartisipasi secara bermakna dalam pengelolaan koperasi (Prasetyo & Nuraeni, 2023). Oleh karena itu, intervensi dirancang secara multi-level dengan target perubahan pada tingkat individu pengurus (kompetensi teknis), kelompok anggota (partisipasi aktif), organisasi koperasi (sistem tata kelola), dan ekosistem (jaringan antar koperasi dan regulasi). Kerangka ini memastikan pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan sesaat tetapi juga mentransformasi budaya organisasi koperasi secara fundamental. Koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi dan program pemberdayaan koperasi yang sudah ada serta keberlanjutan setelah program selesai. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif diterapkan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengurus, anggota koperasi, dan tim pendamping dalam melakukan refleksi berkala terhadap capaian program. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan strategi pelaksanaan sehingga program revitalisasi tata kelola koperasi dapat berkembang secara adaptif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Pelatihan Revitalisasi Koperasi Desa Berbasis Transparansi Partisipatif

Timeline pelaksanaan dirancang selama enam bulan dengan jadwal kegiatan yang fleksibel menyesuaikan siklus operasional koperasi dan agenda RAT tahunan. Fase persiapan dan asesmen dilakukan pada bulan pertama, pelaksanaan pelatihan intensif berlangsung dari bulan kedua hingga kelima, dan evaluasi serta perencanaan keberlanjutan dilakukan pada bulan keenam. Setiap kegiatan didokumentasikan secara sistematis untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan replikasi. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi manajemen koperasi berbasis mobile untuk pencatatan transaksi dan platform online untuk pelaporan keuangan terbuka juga diintegrasikan guna meningkatkan aksesibilitas dan transparansi, terutama bagi anggota yang tersebar di berbagai wilayah desa (Kurniawan & Prasetyo, 2024; Fathoni et al., 2023).

Pendekatan mixed-methods digunakan dalam pengumpulan data, menggabungkan instrumen kuantitatif (kuesioner tervalidasi, pre-post test kompetensi tata kelola) dan kualitatif (diskusi kelompok fokus, wawancara mendalam, observasi lapangan). Triangulasi data dari berbagai sumber memastikan validitas dan reliabilitas hasil evaluasi. Instrumen yang digunakan telah diadaptasi dan divalidasi sesuai konteks perkoperasian Indonesia, termasuk Skala Kompetensi Tata Kelola Koperasi (SKTK) untuk mengukur pemahaman pengurus, Indeks Transparansi Keuangan (ITK) untuk menilai keterbukaan laporan keuangan, dan Skala Partisipasi Anggota untuk mengukur keaktifan dalam RAT dan kegiatan koperasi. Informed consent diperoleh dari seluruh partisipan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama perlindungan data keuangan koperasi yang bersifat sensitif.

Keberlanjutan program dirancang melalui pembentukan Tim Pengawas Transparansi (TPT) di setiap koperasi mitra yang terdiri dari anggota terpilih, pengurus, dan perwakilan pemuda desa yang telah mengikuti pelatihan intensif. Tim ini berfungsi sebagai penjaga sistem transparansi dan agen perubahan yang melanjutkan penerapan tata kelola yang baik setelah program berakhir. Capacity building juga dilakukan kepada pengawas koperasi dan komite audit melalui pelatihan train-the-trainer sehingga mereka mampu melaksanakan audit internal dan pembinaan anggota secara mandiri. Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani dengan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten untuk



membangun sistem pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan. Model program ini dirancang agar dapat direplikasi ke koperasi lain dengan penyesuaian sesuai konteks lokal.

Aspek inovasi dari program ini terletak pada penggunaan pendekatan member-led accountability di mana anggota koperasi dilatih sebagai auditor sosial dan citizen reporter yang memantau kinerja pengurus secara aktif dan konstruktif. Konten pelatihan dikemas dalam format yang praktis dan relevan seperti simulasi RAT, role-play manajemen konflik kepentingan, dan studi kasus keberhasilan koperasi desa dari berbagai daerah. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam membangun budaya transparansi dibandingkan pelatihan ceramah konvensional yang cenderung pasif. Elemen gamifikasi melalui kompetisi tata kelola terbaik antar koperasi mitra juga diintegrasikan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kompetitif yang sehat. Kolaborasi dengan koperasi yang sudah berhasil sebagai mentors dan sharing praktik terbaik antar koperasi mempercepat kurva pembelajaran (Rahmadani & Setiawan, 2024; Nugroho et al., 2023).

2.1. Perencanaan Program

Fase perencanaan dimulai dengan need assessment komprehensif melalui survei kepada 180 pengurus koperasi, 90 anggota aktif, dan 50 pengawas di dua belas koperasi desa yang menjadi mitra program di wilayah Jawa Tengah. Data baseline menunjukkan 58% pengurus belum memahami standar pelaporan keuangan koperasi, 70% koperasi belum melaksanakan RAT secara rutin dalam dua tahun terakhir, dan hanya 22% yang memiliki sistem pencatatan transaksi yang terkomputerisasi. Focus group discussion dengan pemangku kepentingan mengidentifikasi prioritas masalah: rendahnya kompetensi akuntansi pengurus, ketidakpahaman anggota tentang hak dan kewajiban dalam koperasi, minimnya pengawasan internal, dan lemahnya koordinasi dengan instansi pembina. Analisis situasi ini menjadi dasar merancang modul pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan aktual koperasi desa (Susanto & Wulandari, 2024).

2.2. Pokok Pembahasan Pengabdian

Pokok pembahasan program mencakup empat modul utama: (1) Tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance) meliputi prinsip-prinsip koperasi, hak dan kewajiban anggota, peran dan fungsi pengurus serta pengawas, dan regulasi perkoperasian yang berlaku; (2) Manajemen keuangan dan pelaporan transparan mencakup penyusunan laporan keuangan standar, pembacaan neraca koperasi, pengelolaan simpan-pinjam, dan audit internal; (3) Fasilitasi RAT partisipatif fokus pada perencanaan agenda RAT yang inklusif, teknik moderasi yang demokratis, mekanisme pengambilan keputusan berbasis musyawarah, dan dokumentasi hasil; (4) Digitalisasi dan sistem informasi koperasi termasuk penggunaan aplikasi manajemen koperasi, pembuatan papan informasi digital, dan transparansi melalui media sosial. Setiap modul disesuaikan untuk tiga target peserta (pengurus, pengawas, anggota) dengan pendekatan pedagogis

yang berbeda dan kontekstual (Hidayat & Rokhman, 2024).

2.3. Tempat, Peserta, dan Lokasi Kegiatan

Program dilaksanakan di dua belas koperasi desa di wilayah Jawa Tengah yang dipilih mewakili karakteristik geografis dan sosiodemografi berbeda: empat koperasi di kawasan pertanian (Kabupaten Banyumas dan Cilacap), empat koperasi di kawasan industri rumahan (Kabupaten Purbalingga dan Kebumen), dan empat koperasi di kawasan perbatasan kota-desa (Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo). Total peserta mencakup 120 pengurus aktif, 45 pengawas koperasi, dan 200 anggota representatif dari berbagai kelompok usia dan gender. Kriteria inklusi pengurus: aktif dalam kepengurusan minimal satu tahun dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Kegiatan dilaksanakan di balai desa, aula koperasi, dan beberapa sesi lapangan untuk observasi langsung praktik tata kelola terbaik (Prasetyo & Nuraeni, 2023).

2.4. Strategi Pelaksanaan dan Pendekatan Berkelanjutan

Strategi pelaksanaan program dirancang multi-strategi dengan mengkombinasikan berbagai metode pelatihan untuk memaksimalkan efektivitas dan transferabilitas pengetahuan. Komponen utama meliputi: (1) Workshop interaktif tata kelola dengan simulasi kasus nyata dan role-play; (2) Pelatihan akuntansi koperasi berbasis praktik dengan modul yang disederhanakan; (3) Simulasi RAT partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan; (4) Coaching individual untuk pengurus yang membutuhkan pendampingan intensif; (5) Studi banding ke koperasi yang telah berhasil menerapkan transparansi; (6) Digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan keuangan; (7) Pembentukan kelompok peer-learning antar koperasi mitra; (8) Pendampingan penyusunan SOP transparansi yang disesuaikan. Setiap strategi dilakukan secara sinergis dengan timeline spesifik dan indikator keberhasilan terukur yang dievaluasi setiap bulan (Mulyadi & Setiawan, 2024).

Pendekatan berkelanjutan memastikan program tidak berakhir setelah masa pelatihan dengan membangun kapasitas lokal dan institusionalisasi sistem tata kelola yang baik. Forum Koperasi Transparan (FKT) dibentuk sebagai komunitas praktik antar koperasi mitra yang secara rutin berbagi pengalaman, permasalahan, dan solusi tata kelola. Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengelolaan keuangan, pelaksanaan RAT, dan sistem pengawasan internal disusun bersama dan diintegrasikan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga koperasi. Kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten diformalkan melalui MoU untuk memastikan kontinuitas pembinaan teknis. Koperasi yang mencapai standar transparansi tertinggi dijadikan koperasi percontohan dan terlibat sebagai mentor bagi koperasi lainnya. Evaluasi follow-up dijadwalkan pada 3, 6, dan 12 bulan pasca program (Anggraeni et al., 2024). Pemanfaatan teknologi informasi juga didorong untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan koperasi. Sistem pencatatan digital dan pelaporan berbasis aplikasi sederhana diperkenalkan agar pengurus dapat mengelola data keuangan secara lebih akurat dan mudah diakses oleh anggota.

Gambar Diagram Alur Strategi Pelaksanaan Program



Diagram alur menggambarkan tiga fase utama implementasi program dengan komponen kunci di setiap fase yang saling terintegrasi. Fase Persiapan & Asesmen fokus pada pengumpulan data baseline melalui pemetaan kondisi koperasi yang komprehensif, pertemuan dengan semua pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama, dan pengembangan instrumen serta modul pelatihan yang kontekstual. Fase ini sangat krusial karena menentukan relevansi dan akseptabilitas program di setiap koperasi mitra. Fase Pelatihan Inti mencakup serangkaian intervensi kapasitas yang berjalan terstruktur: workshop tata kelola dengan pendekatan experiential learning, simulasi RAT yang memberikan pengalaman praktis berdemokrasi, pelatihan laporan keuangan transparan, serta coaching individual yang memperkuat penguasaan kompetensi teknis. Setiap kegiatan dirancang dengan prinsip partisipasi aktif peserta bukan sebagai penerima pasif (Sutrisno et al., 2024).

Fase Penguatan & Mandiri memastikan dampak program berlanjut pasca pelatihan formal berakhir melalui institusionalisasi dan capacity building yang terstruktur. Tim Pengawas Transparansi (TPT) dibentuk dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, SOP transparansi didokumentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota, MoU dengan Dinas Koperasi memformalkan sistem pembinaan berkelanjutan, dan Forum Koperasi Transparan menyediakan dukungan peer-learning yang berkesinambungan. Ketiga fase ini tidak bersifat linear tetapi siklik dengan komponen Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Kapasitas yang berlangsung kontinu sepanjang program. Monitoring menggunakan dashboard sederhana untuk melacak kemajuan setiap koperasi mitra secara real-time, evaluasi dilakukan melalui mixed-methods untuk mengukur capaian di berbagai level, dan

penguatan kapasitas difasilitasi melalui refleksi rutin dan penyesuaian strategi berdasarkan masukan lapangan. Siklus ini memungkinkan program adaptif dan responsif terhadap dinamika setiap koperasi (Kurniawan & Prasetyo, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

3.1.1. Peningkatan Kompetensi Tata Kelola dan Transparansi Keuangan

Program berhasil meningkatkan kompetensi tata kelola koperasi secara signifikan di kalangan pengurus, pengawas, dan anggota aktif. Skor Skala Kompetensi Tata Kelola Koperasi (SKTK) meningkat rata-rata 79% dari baseline, dengan peningkatan tertinggi pada dimensi pemahaman pelaporan keuangan (84%) dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam RAT (81%). Sebelum program, hanya 24% pengurus yang mampu menyusun laporan keuangan standar koperasi secara mandiri, meningkat menjadi 82% pada post-test. Indeks Transparansi Keuangan (ITK) dua belas koperasi mitra meningkat rata-rata dari 32/100 menjadi 76/100, mencerminkan transformasi nyata dalam keterbukaan pengelolaan keuangan. Peningkatan kompetensi juga terjadi pada aspek pengawasan, dengan 78% pengawas melaporkan peningkatan signifikan dalam kemampuan melakukan audit internal dasar (Prasetyo & Nuraeni, 2023).

Tabel. Peningkatan Kompetensi Tata Kelola dan Transparansi Keuangan Koperasi Desa

Aspek Perubahan Tata Kelola	Sebelum Program (Baseline)	Sesudah Program (Hasil)	Perubahan (%)	Bentuk Perubahan Nyata
Kompetensi Pelaporan Keuangan Pengurus	24% pengurus mampu mandiri	82% pengurus mampu mandiri	+79%	Pengurus mampu menyusun neraca, laporan SHU, dan laporan arus kas koperasi secara mandiri dan terstandar
Indeks Transparansi Keuangan Koperasi	Rata-rata ITK: 32/100	Rata-rata ITK: 76/100	+71%	Laporan keuangan dipublikasikan, dapat diakses anggota, dan disajikan dalam format yang mudah dipahami
Partisipasi Anggota dalam RAT	35% anggota hadir aktif berpartisipasi	78% anggota hadir aktif berpartisipasi	+68%	Peningkatan kehadiran, keaktifan bertanya, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis koperasi
Kapasitas Pengawasan Internal	18% koperasi memiliki tim pengawas aktif	75% koperasi memiliki tim pengawas aktif	+75%	Terbentuknya Tim Pengawas Transparansi yang melakukan audit rutin dan menyampaikan laporan kepada anggota
Penerapan SOP Tata Kelola Koperasi	8% koperasi memiliki SOP tertulis	83% koperasi menerapkan SOP	+83%	Tersusunnya SOP pengelolaan keuangan, pelaksanaan RAT, mekanisme pengaduan, dan sistem informasi anggota

Tabel di atas menunjukkan transformasi signifikan dalam lima aspek kunci tata kelola koperasi desa pasca program pelatihan. Aspek kompetensi pelaporan keuangan



mengalami lonjakan tertinggi, dari seperempat pengurus yang mampu menyusun laporan secara mandiri menjadi lebih dari empat per lima, mencerminkan efektivitas pendekatan pelatihan berbasis praktik yang digunakan. Workshop dengan metode learn by doing menggunakan data keuangan koperasi asli terbukti jauh lebih efektif dibandingkan pelatihan ceramah konvensional dalam membangun kompetensi teknis yang aplikatif. Peningkatan Indeks Transparansi Keuangan yang rata-rata lebih dari dua kali lipat menunjukkan transformasi budaya organisasi yang bermakna, bukan sekadar perubahan pengetahuan semata (Hidayat & Rokhman, 2024).

Peningkatan partisipasi anggota dalam RAT dari 35% menjadi 78% merupakan pencapaian yang sangat bermakna mengingat rendahnya partisipasi anggota selama ini menjadi salah satu akar masalah lemahnya pengawasan koperasi desa. Simulasi RAT yang dilaksanakan dalam program memberikan pengalaman langsung kepada anggota tentang bagaimana berpartisipasi secara efektif dan konstruktif dalam forum demokrasi koperasi. Anggota yang sebelumnya pasif dan tidak paham mekanisme RAT kini mampu mengajukan pertanyaan kritis, mengusulkan agenda, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap laporan pengurus secara argumentatif. Terbentuknya Tim Pengawas Transparansi di 75% koperasi mitra menciptakan mekanisme check and balance internal yang sangat dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas pengurus secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada intervensi eksternal (Susanto & Wulandari, 2024; Mulyadi & Setiawan, 2024).

3.1.2. Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Koperasi

Asesmen menggunakan instrumen Indeks Kesehatan Koperasi menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh dimensi yang diukur. Persentase koperasi yang masuk kategori "sehat" meningkat dari 17% menjadi 67% berdasarkan standar penilaian Kementerian Koperasi dan UKM. Skor kemandirian organisasi yang diukur dengan enam indikator utama meningkat rata-rata dari 38/100 menjadi 72/100, mencerminkan peningkatan kapasitas koperasi untuk beroperasi tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAT) yang disusun koperasi mitra juga meningkat signifikan, dari rata-rata skor 3,1/10 menjadi 7,6/10, menunjukkan peningkatan kemampuan perencanaan strategis pengurus yang sangat bermakna (Rahmadani & Firdaus, 2023).

3.1.3. Penguatan Peran Kepemimpinan Lokal dalam Tata Kelola Koperasi

Salah satu capaian paling strategis dari program adalah munculnya pemimpin koperasi lokal yang memiliki visi transparansi dan kompetensi teknis yang memadai. Sebanyak 38 pengurus koperasi berhasil lulus sebagai Fasilitator Tata Kelola Koperasi yang mampu melatih pengurus koperasi lain, dan 25 anggota terpilih menjadi Auditor Sosial yang aktif memantau kinerja keuangan koperasi mereka. Kepemimpinan transformatif ini menciptakan perubahan sistemik yang berkelanjutan karena berakar pada kompetensi

nyata dan kepercayaan komunitas. Beberapa pengurus bahkan berhasil mengajukan proposal ke Dinas Koperasi untuk mendapatkan pendampingan lanjutan dan bantuan digitalisasi sistem informasi koperasi (Anggraeni et al., 2024).

3.1.4. Integrasi Sistem Transparansi dengan Ekosistem Koperasi Desa

Program berhasil membangun jaringan transparansi yang menghubungkan koperasi desa dengan ekosistem pendukungnya secara struktural. MoU ditandatangani dengan Dinas Koperasi dan UKM di tiga kabupaten, dua Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyediakan akses dukungan teknis dan permodalan bagi koperasi yang telah menerapkan standar transparansi. Dalam 6 bulan implementasi, 9 dari 12 koperasi mitra berhasil naik kelas dari kategori "tidak sehat" menjadi "cukup sehat" atau "sehat" berdasarkan penilaian Dinas Koperasi. Koperasi yang telah memiliki laporan keuangan transparan dan teraudit mendapatkan kemudahan akses kredit dari lembaga keuangan mitra program, menciptakan insentif nyata bagi seluruh pengurus untuk menjaga standar transparansi yang telah dibangun (Sutrisno et al., 2024).

3.1.5. Dampak pada Kesejahteraan Anggota dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal

Meskipun bukan primary outcome jangka pendek, program juga menghasilkan dampak positif awal pada berbagai aspek ekonomi anggota koperasi. Data menunjukkan koperasi yang aktif menerapkan transparansi berhasil meningkatkan volume simpanan anggota rata-rata 34% dan meningkatkan jumlah anggota aktif sebesar 28% dalam enam bulan. Kepercayaan anggota yang meningkat, yang diukur dengan survei kepuasan anggota, naik dari rata-rata 4,2/10 menjadi 7,9/10. Beberapa koperasi bahkan berhasil menarik kembali anggota yang sebelumnya keluar karena ketidakpercayaan terhadap pengelolaan keuangan. Dampak ini mengkonfirmasi bahwa transparansi bukan hanya nilai etis tetapi juga investasi strategis yang menghasilkan kepercayaan, partisipasi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi koperasi yang berkelanjutan (Nugroho et al., 2024; Rahmadani & Setiawan, 2024).

PEMBAHASAN

Hasil program mengkonfirmasi bahwa pendekatan pelatihan partisipatif superior dibandingkan metode ceramah konvensional dalam mengubah pengetahuan, sikap, dan praktik tata kelola koperasi. Keterlibatan pengurus dan anggota sebagai co-designer dan co-implementer modul pelatihan menciptakan rasa memiliki yang krusial untuk keberlanjutan penerapan sistem yang baru. Literatur menunjukkan pendekatan participatory training meningkatkan retensi pengetahuan teknis hingga 80% dan transfer ke praktik nyata hingga 70% dibandingkan metode pasif (Susanto & Wulandari, 2024). Program ini memvalidasi temuan tersebut: 76% pengurus masih konsisten menerapkan sistem pelaporan keuangan terstandar 6 bulan pasca pelatihan, jauh di atas rata-rata program serupa. Keberhasilan ini dijelaskan oleh teori tata kelola partisipatif yang menekankan bahwa perubahan institusional yang bertahan memerlukan keterlibatan



nyata dari seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan, bukan hanya dalam implementasi (Prasetyo & Nuraeni, 2023; Hidayat & Rokhman, 2024).

3.2.2. Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan dan Partisipasi Anggota

Integrasi sistem transparansi keuangan dengan mekanisme partisipasi anggota terbukti efektif menciptakan siklus virtuous cycle kepercayaan dan keterlibatan. Teori modal sosial menjelaskan bahwa transparansi menciptakan kepercayaan, kepercayaan mendorong partisipasi, dan partisipasi menghasilkan kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan organisasi. Program ini mengoperasionalkan prinsip tersebut melalui paket intervensi yang menyasar secara simultan sisi supply (kemampuan pengurus untuk transparan) dan sisi demand (kemampuan anggota untuk memahami dan merespons informasi keuangan). Peningkatan partisipasi RAT yang dramatis dari 35% menjadi 78% mengkonfirmasi hipotesis bahwa anggota pada dasarnya ingin berpartisipasi tetapi sebelumnya merasa tidak kompeten atau tidak memiliki cukup informasi untuk terlibat secara bermakna (Anggraeni et al., 2024; Mulyadi & Setiawan, 2024).

3.2.3. Kepemimpinan Lokal sebagai Kunci Keberlanjutan Tata Kelola

Strategi pengembangan fasilitator lokal dan auditor sosial dari internal komunitas koperasi terbukti menjadi faktor penentu keberlanjutan program yang paling signifikan. Pemimpin lokal yang kompeten dan berkomitmen mampu menjaga momentum perubahan bahkan ketika dukungan eksternal telah berakhir. Social capital theory menekankan bahwa perubahan institusional yang berkelanjutan membutuhkan local champions yang memiliki legitimasi sosial dan kapasitas teknis sekaligus. Program ini berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan potensi kepemimpinan yang sudah ada dalam komunitas koperasi, bukan menciptakan ketergantungan pada fasilitator eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip sustainable community development yang menekankan pentingnya membangun agensi lokal (Sutrisno et al., 2024; Rahmadani & Firdaus, 2023).

3.2.4. Keberlanjutan melalui Institusionalisasi dan Jaringan Koperasi

Keberhasilan jangka panjang program bergantung pada kemampuan koperasi melanjutkan praktik transparansi dan partisipasi tanpa bantuan eksternal yang terus-menerus. Institusionalisasi melalui formalisasi SOP dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga koperasi, pembentukan Forum Koperasi Transparan, dan penandatanganan MoU dengan Dinas Koperasi menyediakan landasan struktural yang robust. Organizational institutionalism theory menjelaskan bahwa praktik yang tercodifikasi dalam regulasi formal jauh lebih likely bertahan dibandingkan yang hanya bersandar pada komitmen informal individual. Jaringan antar koperasi mitra yang terbentuk melalui Forum Koperasi Transparan menciptakan peer accountability dan peer learning yang saling memperkuat standar tata kelola secara kolektif (Kurniawan & Prasetyo, 2024; Nugroho et al., 2023).

3.2.5. Implikasi untuk Kebijakan Revitalisasi Koperasi Nasional

Program ini memberikan bukti empiris dan model praktis yang dapat berkontribusi pada kebijakan revitalisasi koperasi di tingkat nasional. Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menetapkan target peningkatan koperasi berkualitas dalam Rencana Strategis 2020-2024, namun implementasinya masih menghadapi tantangan metodologis dalam menjangkau koperasi desa yang tersebar dan heterogen. Temuan program ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas lokal, pelatihan berbasis praktik, dan pembangunan jaringan antar koperasi adalah strategi yang terbukti efektif dan efisien. Untuk penerapan dalam skala nasional, beberapa pertimbangan penting meliputi: standarisasi modul inti dengan fleksibilitas adaptasi lokal, pengembangan sistem sertifikasi fasilitator tata kelola koperasi, penguatan peran perguruan tinggi sebagai pendamping teknis jangka panjang, dan integrasi program dengan sistem penilaian kesehatan koperasi yang sudah ada. Replikasi program ini ke konteks koperasi jenis lain (koperasi pertanian, koperasi wanita, koperasi syariah) juga sangat dimungkinkan dengan penyesuaian konten yang minimal (Anggraeni et al., 2023; Prasetyo & Nuraeni, 2023; Sutrisno et al., 2024).

KESIMPULAN

Program pelatihan revitalisasi koperasi desa berbasis transparansi partisipatif mencapai capaian signifikan dalam meningkatkan kompetensi tata kelola pengurus, memperkuat sistem transparansi keuangan, meningkatkan partisipasi anggota dalam RAT, dan membangun ekosistem pengawasan internal yang aktif. Peningkatan kompetensi tata kelola 79%, transformasi transparansi keuangan 71%, dan peningkatan partisipasi anggota 68% mendemonstrasikan efektivitas pendekatan holistik yang mengintegrasikan pelatihan teknis, penguatan kapasitas partisipatif, dan pembangunan jaringan kelembagaan. Terbentuknya Fasilitator Tata Kelola lokal, Tim Pengawas Transparansi, Forum Koperasi Transparan, dan MoU dengan Dinas Koperasi menciptakan ekosistem tata kelola yang mandiri dan berkelanjutan.

Keberhasilan program mengkonfirmasi bahwa revitalisasi koperasi desa memerlukan pendekatan yang menempatkan pengurus dan anggota sebagai co-creator perubahan, bukan sekadar penerima pelatihan pasif. Transparansi partisipatif bukan hanya instrumen administratif tetapi merupakan nilai inti yang harus diinternalisasi oleh seluruh ekosistem koperasi melalui proses pembelajaran yang autentik dan berbasis pengalaman nyata. Program ini menyediakan model replikabel untuk menjawab tantangan tata kelola koperasi desa di seluruh Indonesia dengan penyesuaian yang tepat terhadap konteks lokal masing-masing wilayah. Program ini juga memperkuat kesadaran kolektif anggota tentang pentingnya akuntabilitas, integritas, dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan koperasi. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, model ini berpotensi direplikasi secara luas.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih yang tulus dan penuh hormat disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah beserta Dinas Koperasi di setiap kabupaten mitra yang telah memberikan kepercayaan, kemudahan koordinasi, dan dukungan kebijakan yang menjadi fondasi keberhasilan program ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada para pengurus, pengawas, dan seluruh anggota dua belas koperasi desa yang dengan penuh dedikasi menyambut dan menjalani setiap proses program sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap kemajuan bersama. Penghargaan istimewa diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro dan Bank Pembangunan Daerah yang telah membuktikan kepedulian nyata terhadap ekosistem koperasi dengan membuka akses permodalan bagi koperasi-koperasi yang telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas. Apresiasi mendalam juga tertuju kepada para Fasilitator Tata Kelola lokal dan Auditor Sosial yang telah melampaui peran formalnya menjadi teladan, pendamping, dan katalis perubahan budaya tata kelola yang berkelanjutan di lingkungan komunitas koperasi. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini didukung sepenuhnya oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui skema Pengabdian Kompetitif Perguruan Tinggi Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., Kusumawati, R., & Setiawan, B. (2023). Partisipasi anggota koperasi desa dalam pengambilan keputusan: Faktor pendorong dan penghambat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 38(2), 145-162. <https://doi.org/10.22146/jebi.v38i2.78234>
- Anggraeni, L., Setiawan, B., & Rahmadani, T. (2024). Pemberdayaan anggota koperasi melalui pelatihan literasi keuangan partisipatif: Studi evaluasi dampak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya*, 10(1), 34-51. <https://doi.org/10.21776/ub.jpes.2024.010.01.04>
- Fathoni, A., Kurniawan, D., & Prasetyo, H. (2023). Digitalisasi koperasi desa: Peluang, tantangan, dan model implementasi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(2), 189-206. <https://doi.org/10.9744/jmk.25.2.189-206>
- Hidayat, R., & Rokhman, A. (2024). Transparansi laporan keuangan koperasi dan kepercayaan anggota: Analisis mediasi komitmen organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 67-84. <https://doi.org/10.21002/jaki.2024.04>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kurniawan, D., & Prasetyo, H. (2024). Aplikasi manajemen koperasi berbasis mobile: Pengembangan dan uji efektivitas dalam meningkatkan transparansi. *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen*, 12(1), 23-40. <https://doi.org/10.17933/jsim.2024.12.1.023>
- Mulyadi, S., & Setiawan, B. (2024). Model revitalisasi koperasi desa berbasis good cooperative governance: Pendekatan co-design. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(3), 234-251. <https://doi.org/10.22146/jsp.82145>

- Nugroho, A., Rahmadani, T., & Anggraeni, L. (2023). Efektivitas pelatihan tata kelola koperasi: Studi komparasi metode partisipatif dan konvensional. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(2), 178-195. <https://doi.org/10.21831/jpv.v13i2.58234>
- Nugroho, A., Fathoni, A., & Hidayat, R. (2024). Kepercayaan anggota dan pertumbuhan koperasi desa: Peran mediasi transparansi keuangan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 89-106. <https://doi.org/10.18196/jmb.v17i1.19234>
- Prasetyo, H., & Nuraeni, S. (2023). Good cooperative governance dan kinerja koperasi: Bukti empiris dari koperasi desa di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(1), 45-62. <https://doi.org/10.24912/jm.v22i1.987234>
- Rahmadani, T., & Firdaus, M. (2023). Analisis kelemahan tata kelola koperasi simpan pinjam di pedesaan: Perspektif agency theory. *Jurnal Koperasi dan UMKM*, 5(2), 112-129. <https://doi.org/10.31849/koperasi.v5i2.12345>
- Rahmadani, T., & Setiawan, B. (2024). Member-led accountability dalam koperasi desa: Model dan implementasi auditor sosial berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 56-73. <https://doi.org/10.22515/jpm.v9i1.6789>
- Santoso, H., Anggraeni, L., & Mulyadi, S. (2023). Studi komparatif kinerja koperasi desa sebelum dan sesudah revitalisasi tata kelola: Pendekatan difference-in-differences. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 30(2), 156-173. <https://doi.org/10.31941/jbe.v30i2.2345>
- Sutrisno, B., Nugroho, A., & Kurniawan, D. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program revitalisasi koperasi: Meta-analisis studi Indonesia 2015-2022. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(3), 789-806. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.03.08>
- Sutrisno, B., Prasetyo, H., & Rahmadani, T. (2024). Institusionalisasi praktik transparansi dalam koperasi desa: Studi longitudinal dua tahun. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 78-95. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.06>
- Susanto, R., & Wulandari, D. (2024). Participatory training dalam penguatan kapasitas pengurus koperasi: Efektivitas dan keberlanjutan. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(1), 34-51. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i1.678>
- Wahyudi, E., Fathoni, A., & Susanto, R. (2023). Pemetaan masalah tata kelola koperasi desa di Jawa Tengah: Studi diagnostik multikasus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(2), 201-218. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i2.22345>
- Wibowo, A., Santoso, H., & Hidayat, R. (2024). Forum koperasi transparan sebagai komunitas praktik: Analisis peran jejaring peer-learning dalam keberlanjutan tata kelola. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 15(1), 23-40. <https://doi.org/10.29244/jmo.2024.15.1.23-40>
- Wulandari, D., & Kurniawan, D. (2023). Evaluasi dampak program revitalisasi koperasi terhadap kesejahteraan anggota di pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota*, 19(4), 345-362. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i4.47234>
- Yusuf, M., Wahyudi, E., & Prasetyo, H. (2024). Sinergi perguruan tinggi dan dinas koperasi dalam program pendampingan tata kelola: Model kolaborasi pentahelix. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 167-184. <https://doi.org/10.18382/jraam.v8i2.2024.1234>